

## KONSEPSI INTELEKTUALITAS, KEUANGAN, DAN MASSA DALAM PEMILIHAN BUPATI SIKKA TAHUN 2018

Alfian Harbiyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa Maumere  
Email: Alfiancemara@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Dimana pemilihan Kepala Daerah (Bupati) dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih siapa pemimpin yang akan memimpin suatu daerah tersebut. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Setiap rakyat pasti menginginkan seorang pemimpin yang cerdas, bertanggung jawab dan bisa peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan itu semua tidak terlepas dari apa yang pemimpin itu lakukan saat mereka mencalonkan diri.

Bagaimana mereka menyusun strategi untuk dipilih dan disukai oleh rakyat. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menjalin relasi dan menarik perhatian rakyat sampai dengan bagaimana mereka menyusun konsep keuangan dan massa dalam perhelatan pemilihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kepala Daerah Kabupaten Sikka menarik simpati rakyat untuk memilihnya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi sehingga penelitian ini menghasilkan pengetahuan baru bagi peneliti bahwa setiap calon Kepala Daerah memiliki strategi masing-masing untuk bisa menarik perhatian rakyat salah satunya adalah dengan melakukan kampanye.

**Kata kunci** : Negara Demokrasi, Strategi Politik, Pilkada

### ABSTRACT

*Indonesia is a democracy. Where the election of the Regional Head (Regent) is directly elected by the people. The people have full rights to choose who the leader will lead an area. Elections are held in a direct, public, free and confidential manner. Election of regional head and deputy regional head, or often called local election or post-conflict local election, is a general election to elect regional heads and deputy regional heads directly in Indonesia by local residents who meet the requirements. Every people would want a leader who is intelligent, responsible and can be sensitive to problems that occur in the community itself. And it all can not be separated from what leaders do when they run.*

*How they arrange strategies to be chosen and liked by the people. How do they communicate, how are they in a relationship and attract the attention of the people to how they arrange the concepts of finance and the masses in the election event. The purpose of this study was to find out how the Regional Head of Sikka Regency attracted the sympathy of the people to vote for him. This research was conducted with interview and observation techniques so that this*

*research generates new knowledge for researchers that each Regional Head candidate has their respective strategies to be able to attract the attention of the people one of which is to conduct a campaign.*

**Keywords:** *Democratic State, Political Strategy, Local Election*

## PENDAHULUAN

Negara yang demokrasi adalah negara dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Rakyat bebas memilih siapa saja untuk menjadi pemimpin tanpa paksaan tapi memilih dengan hati nurani mereka. Pemimpin yang cerdas, peka terhadap situasi masyarakat, dll adalah calon pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Pemimpin harus bisa menjadi perubahan bagi suatu daerah atau masyarakat. Pemimpin harus bisa mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi mereka dan melaksanakan program kerja yang telah mereka paparkan dalam kampanye.

Untuk menarik simpatik rakyat, calon pemimpin harus bisa mendekati diri dengan masyarakat harus bisa berkomunikasi politik dan harus bisa mengelola keuangan dalam masa perhelatan pemilihan pemimpin. Masyarakat sering menduga bahwa uang yang digunkan oleh calon pemimpin merupakan uang dari hasil korupsi. Masyarakat sering mengsalah artikan apa yang dilakukan oleh calon pemimpin pada masa pilkada ini. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh calon pemimpin itu adalah bentuk dan strategi calon pemimpin untuk menarik hati masyarakat dan itu wajib dilakukan oleh calon pemimpin. Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai.

Kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita - cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang - kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who gets what, when, how). Selain itu, politik juga dipahami sebageian pembagian nilai-nilai oleh orang -orang yang berwenag, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan.

Mengenai komunikasi politik ini (political communication) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

## KERANGKA TEORI

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka

menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai - nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what effect*", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi.

Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk memperjelas pemahaman berikutnya tentang komunikasi politik, Alwi Dahlan mengemukakan bahwa, sebagai bidang kajian ilmu, komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikai yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Berbasis pada formulasi komunikasi demikian saja menurut Fagen nampaknya terlalu sederhana, karena alur komunikasi politik berjalan satu arah (linier) dari sumber komunikasi sebagai pemrakarsa kepada orang lain sebagai penerimanya. Namun demikian agar memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi. Tanpa ada teori politik umum yang didasarkan pada komunikasi, akan muncul kesulitan bagi "suatu pendekatan untuk studi politik", suatu pendekatan di mana komunikasi sebagai suatu proses menjadi inti pemahaman, sehingga secara hipotetik nampak berkembang.

## METODE PENELITIAN

*New Institutionalism* merupakan salah satu paradigma yang berkembang dalam ilmu politik. Paradigma ini merupakan kritik atas pendahulunya, yaitu *Institutionalism*. Seperti diketahui bahwa *Institutionalism* memiliki karakter utama, yakni : pertama, cita-cita politik yang berkembang dalam sejarah politik Barat diwujudkan dalam hubungan-hubungan khusus antara penguasa dan rakyat. Kedua, selalu memiliki ciri khas dimana aturan, prosedur, dan organisasi pemerintahan menjadi starting point dalam diskursus politik kenegaraan dan metode penelitian ilmu politik.

Cara pandang tersebut tentu saja memiliki kelemahan di mana cenderung menganggap tidak penting aktor politik sebagai inisiator. Pembentukan atau perubahan sebuah institusi, tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor inisiatornya. Dalam konteks untuk menjawab kelemahan inilah muncul cara pandang yang mengoreksi *Institutionalism*, yakni *New Institutionalism*. Menurut fokus perhatian *New Institutionalisme* dibedakan dalam beberapa pendekatan turunan yakni *Rational Choice Institutionalism*, *Sociological Institutionalisme*, dan *Historical Institutionalism* (Campbel, 2004).

Pertama, *Rational Choice Institutionalism* merupakan aliran pendekatan institutionalisme baru yang sangat kentara dipengaruhi oleh tradisi behavioralis yang menganggap bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri individu. Menurut Hall dan Taylor

(1996,146) menganggap bahwa aktor, baik individu maupun organisasi selalu memiliki seperangkat preferensi atau selera yang baku. Untuk mencapai preferensi-preferensi tersebut, aktor akan bertindak dan berperilaku secara instrumental, bertindak strategis dan membuat kalkulasi yang komprehensif untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. *Rational Choise* memiliki fokus utama pada persoalan bagaimana aktor-aktor yang ada membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Institusi juga dianggap hadir untuk menata interaksi-interaksi aktor dengan cara mempengaruhi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu institusi juga diharapkan bisa melanjutkan agenda dan preferensi individu dan organisasi.

Kedua, *Sociological Institutionalism* merupakan *institutionalism* yang berfokus pada upaya institusi untuk mampu menyediakan identitas dan makna interaksi sosial. Selain itu juga *concern* pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor. Menurut Campbel (2004:17) cara pandang ini melihat bahwa lingkungan (nilai dan identitas) akan mempengaruhi pilihan dan strategi aktor politik dalam institusi. Perubahan dan pembentukan institusi harus mempertimbangkan faktor eksternal institusi.

Ketiga, institusionalisme historis (*historical institutionalism*). Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik.

Ketiga pendekatan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam berbagai analisa politik. Berbicara pendekatan, maka tentu saja memiliki kelemahan selain tentunya kelebihan. Kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian dikritik oleh pendekatan-pendekatan lainnya seperti konstruktivis, positivist, dan pendekatan lainnya. Hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Yang terpenting dalam cara pandang adalah konsisten dan memiliki argumentasi yang mampu membuktikan kesimpulan kita. Cara pandang dalam analisa politik bagaikan ruh yang sangat penting untuk membangun positioning dan pemihakan penulis atau pengkaji akan satu tema politik tertentu. Dalam satu kondisi cara pandang ini dapat dijadikan frame dalam mengarahkan kajian untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu dipertanggungjawabkan secara metodis.

Memang membicarakan metode ilmu politik harus disertai dengan mengkaji lebih lanjut metode penelitian politik, sebagai manifestasi konsekuensi memilih satu pendekatan tertentu. Satu pendekatan mungkin tidak cocok dengan metode penelitian tertentu. Semisal jika kita memilih cara pandang behavioralisme dalam kajian tema politik kita, maka akan lebih efektif mengkajinya dengan menggunakan metode yang biasa digunakan postivist, karena meneliti perilaku politik seseorang akan lebih mudah dengan menggunakan tradisi penelitian kuantitatif, dibanding kualitatif. Sehingga lebih cocok jika menggunakan tradisi positivist.

## DISKUSI

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pada masa PILKADA 2018, terdapat tiga pasangan yang mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka Periode 2018-2023. Pada masa PILKADA itu juga para calon melakukan beberapa kegiatan untuk menarik perhatian rakyat. Mulai dari kampanye, mengunjungi desa-desa yang tertinggal, mengunjungi sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Banyak tim-tim sukses dari masing-masing paket menjagokan paket-paketnya masing-masing.

Dalam memenakan satu partai para tim sukses atau relawan saling menjatuhkan paket lain untuk menguntungkan paket yang mereka dukung, hal ini dibuktikan dengan sindiran-sindiran di dunia maya lebih tepatnya pada Facebook. Jika diselidiki lebih jauh, para calon kepala daerah tersebut tidak ikut serta menjatuhkan paket lainnya. Malah mereka memilih untuk bersaing secara lebih sehat. Rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka dalam Pemilukada 27 Juni 2018, telah diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka. Calon Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo Idong., S.Sos., M.Si dan Calon Bupati Romanus Woga mengantongi perolehan suara terbanyak 63.039 suara. peringkat kedua diraih pasangan Drs. Alex Longginus-Fransiskus Stefanus Say S.E 49.690 suara dan peringkat ketiga oleh Drs. Yosef Ansar Rera-Rafael Raga, SP menghimpun 44.476 suara. pasca rekapitulasi perolehan suara dari 21 kecamatan di Kabupaten Sikka tak terdengar akan ada gugatan dari salah satu tim pasangan calon yang gagal dapatkan suara terbanyak.

Sampai hari ini tidak ada informasi apapun ada gugatan dari tim pasangan calon. mudah-mudahan tidak ada gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) kata juru bicara KPU Kabupaten Sikka Fery Soge. meskipun sampai saat ini belum ada gugatan perolehan suara, KPU Sikka belum bisa menetapkan pasangan calon memperoleh suara terbanyak. KPU Sikka menetapkan calon terpilih setelah mendapatkan surat keputusan dari MK yang menyatakan tidak ada gugatan perhitungan selisih perolehan suara. Hasil penetapan ini diserahkan kepada DPRD Sikka untuk bersama-sama pemerintah daerah memproses pelantikannya.

### **Intelektual, Keuangan, dan Massa**

Peneliti mewawancarai mantan Bupati Sikka periode 2013-2018, Drs. Yoseph Ansar Rera tentang bagaimana strategi sehingga Ia bisa menjadi Bupati. Dari hasil wawancara yang

peneliti lakukan, Drs. Ansar Rera mengaku bahwa Ia bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Sikka lagi karena kepercayaan masyarakat kepadanya. Ada satu alasan lagi yang membuat Drs. Ansar Rera kembali menclonkan diri sebagai Bupati Sikka periode 2018-2023 yaitu bahwa Ia ingin menyelesaikan dan menuntaskan program-program kerja yang belum sempat Ia kerjakan karena alasan tertentu. Drs. Ansar Rera mengatakan bahwa ada 3 sektor utama dan unggul yang harus dikembangkan di Sikka, diantaranya adalah sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor pariwisata.

Visi dan misi Drs. Ansar Rera masih tetap sama yaitu “Menuju Sikka Yang Satu”. Dari visi dan misi itu mantan Bupati Sikka ini ingin memajukan Sikka menjadi lebih unggul dan lebih baik. Drs. Ansar Rera pada periode ini kurang mendapat dukungan dari masyarakat Sikka, namun hal ini tidak membuatnya kecewa melainkan Ia lebih termotivasi untuk menjadikan Sikka yang satu, Sikka yang unggul dan Sikka yang berkualitas.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa kepribadian dari Drs. Ansar Rera wajib untuk dicontoh. Kepribadian yang ramah dan sederhana menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri untuk orang lain. Mantan Bupati Sikka itu juga mengatakan bahwa saat kita mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin hal yang utama yang kita butuhkan adalah dana. Saat kita tidak mempunyai dana, kita akan kesusahan. Tidak hanya itu, mantan Bupati Sikka ini juga mengatakan bahwa dalam memilih seorang pemimpin, kita harus mengetahui dulu bagaimana kepribadian dari pemimpin itu sendiri, bagaimana pemimpin itu membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, bagaimana pemimpin menguasai komunikasi politik dengan baik.

Saat peneliti bertanya mengenai dana atau konsep keuangan intelektual dan massa dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah Sikka, Drs. Ansar Rera mengatakan bahwa kendala utama untuk kampanye adalah dana. Drs. Ansar Rera mengaku bahwa Ia menggunakan uang pribadi dan sumbangan relawan partai serta beberapa dana dari pihak ketiga yang sesuai dengan UU KPU untuk membentuk tim kerja (tim sukses). Untuk mengontrol keuangan, Drs. Ansar Rera mengatakan bahwa ada bendahara yang memajemen keuangan. Jadi setiap pengeluaran dan pemasukkan dicatat dan dilaporkan kepada KPU.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa hal yang disimpulkan sebagai berikut Dari hasil penelitian , peneliti mendapatkan informasi bahwa konsep keuangan telah dimanage dengan baik oleh bendahara dalam suatu paket. Uang itu juga berasal dari dana politik, dana pribadi, dan dari pihak ketiga yang sesuai dengan UU KPU. Dengan begitu, keuangan bisa terkontrol dan bisa diberitahukan kepada KPU.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Gde Febri Purnama Putra. 2009. *Meretas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*. Yogyakarta : Gava Media
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djohan, Djoehermansyah. Suwandi Made. 2005. *Pilkada Langsung Pemikiran Dan Peraturan*. Jakarta : IP Press.

- Huasani Usman dan Purnomo, 2004. *Metedologi Penelitian Sosial*, Bandung : Bumi Aksara.
- Mubarok, Mufti M. 2005. *Sukses Pilkada*, Surabaya : PT. Java Pustaka Media Utama.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/09/penetapan-calon-bupati-dan-wabup-sikka-terpilih-tunggu-surat-mahkamah-konstitusi>